

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN DI PULAU PASARAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Ali Imron^a, Dewie Brima Atika^b, Eko Budi Sulistio^c
^{abc} *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung*
korespondensi: dewiebrimaatika@gmail.com

Abstrak

Pasaran island have the potential high economics and widely known also as one of the areas producer anchovies largest in the province of Lampung. The reality can't managed well especially in organize the fish processing. Research purposes was how empowerment the coastal communities and obstacles faced in empowering the coastal communities through the development of cluster fish. This research using type research descriptive qualitative. The result of this research showed that empowerment the community through cluster development fish on the Pasaran Island not maximum because not the efforts that in the nature of cluster maintenance of fish on the Pasaran Island for later. The factors becomes an obstacle, the difficulty of change the paradigm think and a community objective, that the lack of funds, low education level.

Keywords: empowerment coastal communities , cluster development fish

Abstrak

Pulau pasaran memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri terbesar di Provinsi Lampung. Potensi tersebut belum dikelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat pesisir dan teridentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran belum maksimal karena tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan klaster ikan di Pulau Pasaran untuk selanjutnya. faktor yang menjadi kendala yaitu, sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran, Adanya keterbatasan dana, dan Tingkat pendidikan rendah

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan klaster ikan

PENDAHULUAN

Keberadaan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia merupakan realitas yang harus diterima sebagai konsekuensi dari sebuah Negara Kepulauan. Pulau-pulau kecil merupakan sebuah pulau yang memiliki karakteristik yang unik baik secara fisik maupun sosial budaya masyarakatnya. Kondisi dan karakteristik pulau-pulau kecil tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat mengelola secara bijak sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan pulau-pulau kecil memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. (Sumber: <http://beranda-miti.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 September 2014)

Pengelolaan pulau-pulau kecil pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal ini, sejalan dengan penerapan otonomi daerah di

Indonesia, maka kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil diserahkan kepada daerah sepenuhnya. Berdasarkan UUD 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, maka kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya alam dikelola secara sah oleh daerah dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan untuk mengelola pulau-pulau kecil di daerahnya. Letak geografis Kota Bandar Lampung yang memiliki daerah pesisir dan pulau mengharuskan adanya pengelolaan secara terpadu, diantaranya adalah Pulau Kubur dan Pulau Pasaran yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 32 Tahun 2010, Pulau Pasaran telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Pulau pasaran merupakan pulau kecil yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pulau Pasaran telah dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri kering terbesar di Provinsi Lampung. Sebagian besar masyarakat di Pulau Pasaran berprofesi sebagai pengolah ikan teri. Ikan teri merupakan komoditas yang relatif tersedia di Pulau Pasaran karena aktivitas nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Pasaran Produk teri kering yang menjadi prioritas pengolah terdiri dari teri nasi, teri nilon, dan teri jengki. (Sumber: <http://www.bi.go.id/umkm/lampung> diakses pada tanggal 3 Desember 2014).

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan hasil tahun (2015) produksi perikanan secara umum hasil tangkapan nelayan \pm 25.731.000 ton/tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga potensi perikanan di Kota Bandar Lampung dari hasil tangkapan nelayan \pm sepertiganya merupakan hasil tangkapan ikan teri, sedangkan hasil tangkapan perikanan darat \pm 243.000 ton/tahun merupakan produksi ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Bandar Lampung. Sayangnya kondisi produk-produk ikan teri di Pulau Pasaran juga terkendala masalah kebersihan dan sanitasi. Hasil ikan dan kerang hijau di Pulau Pasaran belum layak produknya untuk diekspor ke luar negeri. Penyebabnya, sampah-sampah banyak berserakan, seperti plastik bekas *snack*, botol-botol, serta kayu-kayu banyak terlihat di setiap perkampungan dan di dalam laut serta tempat pengeringan teri yang kemungkinan besar terjadi kontaminasi karena banyaknya binatang, seperti kucing dan ayam, berkeliaran di area pengeringan. Selain itu, akses masuk ke Pulau juga tidak representatif lantaran jembatan yang ada hanya bisa dilalui oleh sepeda motor sehingga sulit dalam menyalurkan produk. Sistem pemasaran ikan teri siger selama ini dijual dengan sistem ikan dikirim kepada tengkulak (*broker*) di muara kapuk Jakarta, sesampai di Jakarta harga beli ikan ditentukan oleh pihak *broker*, baru diinformasikan kepada pengolah ikan teri di pulau pasaran, sehingga si nelayan dan pengolah tidak memiliki nilai tawar. (Sumber: <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran> diakses pada tanggal 3 Desember 2014)

Potensi yang besar tersebut sangat disayangkan belum dapat dikelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Pengorganisasian para pengolah ikan teri kering dalam satu wadah kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pola klaster. Dengan pola klaster, maka para pengolah ikan teri kering yang ada wilayah tersebut dapat saling mendukung, melengkapi serta bekerja bersama dan untuk maju bersama-sama. Dalam mencapai hal tersebut tentu diperlukan strategi dan intervensi terhadap komunitas sasaran. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasi potensinya. Peningkatan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri komunitas itulah yang dikenal dengan penguatan kapasitas.

Pemberdayaan merupakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Lambolo (2010:32) menyatakan bahwa arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan. Rasyid dalam Lambolo (2010:32) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri.

Lebih lanjut Mardikanto dkk (2013:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya.

Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto Suharto (2005:95) pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pendampingan sosial yang berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yakni: pemungkinan atau fasilitasi (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendudukan (*supporting*). Hal serupa juga diungkapkan oleh Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117) Proses pemberdayaan hendaknya *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulant dan proses yang ada menjebak masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan. Lebih lanjut Lambolo (2010:36) mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan pemberdayaan, sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pemerintah menggalakkan pengembangan komoditi dengan pola OVOP/*one village one product* yang berbasis klaster. Program OVOP ini sangat cocok dilaksanakan di Pulau Pasaran mengingat produk ikan teri sudah menjadi produk utama di pulau tersebut. Usaha ini menjadi andalan sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di pulau maupun pekerja dari luar pulau. Pengembangan komoditas unggulan tersebut dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat lewat penguatan kapasitas pengembangan klaster ikan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pengolah ikan kering di Pulau Pasaran serta meningkatnya kegiatan usaha mikro dan kecil yang dilakukan komunitas nelayan pengolah ikan kering.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode tersebut digunakan dalam untuk memperoleh penjelasan dan gambaran atas pemberdayaan masyarakat pesisir di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung melalui pengembangan klaster ikan dengan mengungkap fenomena dilapangan yang bersifat empiris yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bank Indonesia (2015:13) klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi bersifat komplementer. Kedekatan produk dari perusahaan- perusahaan ini pada tahap awal memacu kompetisi yang mendorong adanya spesialisasi, peningkatan kualitas, serta mendorong inovasi dalam diferensiasi pasar. Klaster disebabkan oleh keunggulan daya saing, sejarah dan institusi. Keunggulan daya saing berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kondisi penawaran dan permintaan, hubungan industri dan persaingan lokal yang memberikan keuntungan bagi perusahaan lokal. Sejarah, berkaitan dengan faktor yang mendasari industri atau penggunaan teknologi yang menyebabkan keunggulan kompetitif. Institusi adalah kelembagaan formal dan informal yang mempengaruhi pengembangan klaster guna mendukung kreasi, difusi, dan pengetahuan.

Tujuan pelaksanaan program pengembangan lembaga lokal dalam rangka mewujudkan klaster modern, antara lain:

- a. Menumbuhkan soliditas kelompok sehingga dapat meningkatkan interaksi antar aktor pembentuk klaster yang mengarah pada rasa saling memiliki diantara kelompok
- b. Mewujudkan kelompok pengolah ikan teri kering yang mempunyai kemandirian dalam aspek permodalan maupun pemasaran
- c. Mengembangkan keterampilan pengolah untuk membuat produk turunan ikan teri higienis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk ikan teri kering
- d. Memfasilitasi penguatan jalur distribusi dan pemasaran produk ikan teri kering beserta produk turunannya
- e. Memfasilitasi perluasan jaringan pengolahan ikan kering dari subsistem dari hulu sampai hilir
- f. Mengembangkan sinergi positif antar unit usaha sehingga dapat menciptakan *positioning* kualitas ikan kering khas pulau pasaran yang menjadi trigger terwujudnya *demand condition* yang *sustainable*.

Sasaran atau *output* yang diharapkan dalam pelaksanaan program pengembangan klaster antara lain:

- a. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang solid dan mandiri sehingga dapat meningkatkan daya tawar dalam rangka menghadapi *end user*
- b. Terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro dengan fasilitas kelompok yang solid
- c. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang terampil dalam membuat produk turunan sehingga meningkatkan nilai tambah
- d. Terbentuknya sistem distribusi dan pemasaran ikan teri kering beserta produk turunannya yang dikelola oleh kelompok secara solid
- e. Terwujudnya jaringan pengolahan ikan teri kering yang solid dari subsistem hulu sampai hilir
- f. Terwujudnya unit usaha dengan *positioning* produk ikan teri kering yang berdaya saing (*competitiveness*) tinggi karena adanya *demand condition* produk yang berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan klaster di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, akan dianalisis melalui empat tahapan proses yakni: pertama; Pemungkinan atau fasilitasi (*Enabling*), kedua; Penguatan (*Empowering*), Ketiga; Pendukungan (*Supporting*), dan keempat; Pemeliharaan (*Foresting*):

Imron, Atika,
Sulistio:
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir Melalui
Pengembangan
Klaster ...

116

Pemungkinan atau Fasilitasi (Enabling)

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87) Pemungkinan atau fasilitasi (*Enabling*) adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan (*Enabling*) berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Upaya pemberian kesempatan ini berkaitan dengan manajemen sumber dimana pihak yang memberdayakan dalam hal ini fasilitator memfasilitasi masyarakat dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat serta penyediaan fasilitas oleh fasilitator. Sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam pengembangan klaster ikan dapat digolongkan menjadi sumber personal, interpersonal dan sumber sosial. Pemanfaatan sumber personal ini dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan dengan melakukan penyuluhan secara rutin oleh fasilitator dan masyarakat pulau Pasaran. Sumber interpersonal berkaitan dengan sarana materil yang dimiliki fasilitator dan masyarakat di Pulau Pasaran. Berdasarkan data dan dokumentasi yang peneliti dapat, fasilitator telah menyediakan berbagai sarana yang dibutuhkan masyarakat setempat, seperti tempat pelelangan ikan, serta sarana dan prasarana pengolahan ikan teri. Berikut daftar fasilitas yang ada dilokasi sentra pengolahan ikan teri tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Fasilitas Yang Ada Dilokasi Sentra Pengolahan Ikan Teri

Fasilitas Umum	Fasilitas Milik Pengolah
a. Air bersih dari PDAM	a. Lahan untuk tempat penjemuran ikan
b. Listrik	b. Kapal berukuran 15 GT
c. Jalan yang telah di paving	c. Tempat perebusan ikan di atas kapal
d. Dermaga untuk sandar labuh	d. Trays
e. Pusat Kesehatan Kelurahan	e. Gas Elpji
f. Koperasi ISM Mitra Karya Bahari	f. Bakul

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2016

Sumber sosial berkaitan dengan kelembagaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan yaitu Bank Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang selaku melaksanakan program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung dengan cara mengadakan pembinaan untuk membentuk koperasi yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) program dalam jangka panjang.

Menurut Suharto (2005:95) menyatakan bahwa sumber-sumber merupakan hal penting dalam indikator pemungkinan atau fasilitasi. Apabila ketiga sumber ini telah terpenuhi maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan telah berjalan dengan baik. Merujuk pada pendapat tersebut maka pemungkinan atau fasilitasi (*enabling*) di Pulau Pasaran telah berjalan dengan baik terlihat dari upaya pemerintah dan lembaga masyarakat dalam memfasilitasi sumber personal, interpersonal, dan sosial.

Penguatan Kapasitas Masyarakat (Empowering)

Program pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung melalui kegiatan pendampingan intensif sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, yang mulai dikembangkan sejak tahun 2010 sampai dengan 2013. Instrumen penting dalam program pengembangan klaster pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan koperasi. Adapun tujuan pembentukan kelembagaan koperasi adalah untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) program dalam jangka panjang, dengan syarat pengelolaan, sistem serta kesiapan pengelolaan yang baik secara fisik maupun non fisik. Melalui keberadaan koperasi ini, pihak fasilitator melakukan penguatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan. Koperasi Mitra Karya Bahari merupakan media bagi fasilitator untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terkait pengembangan wilayah klaster ikan di Pulau Pasaran. Didirikannya koperasi Mitra Karya Bahari memudahkan fasilitator meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat.

Menurut Suharto (2005:95) bahwa penguatan kapasitas (*empowering*) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan dengan *empowering*. Dalam hal ini, Bank Indonesia melalui pendampingan koperasi Mitra Karya Bahari di Pulau Pasaran, tidak hanya melakukan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, tetapi juga melakukan penguatan kelembagaan koperasi sebagai upaya penyadaran masyarakat Pulau Pasaran agar termotivasi untuk berkelompok yang akhirnya mempunyai kesamaan visi dan misi dalam pencapaian kesejahteraan bersama melalui pembentukan unit usaha bersama namun faktanya penguatan yang dilakukan di Pulau Pasaran belum berjalan maksimal karena penguatan dilakukan ketika ada fasilitator saja namun ketika fasilitator sudah keluar (*phasing out*) dari pengembangan klaster ini maka masyarakat Pulau Pasaran kembali kepada kegiatan semula.

Pendukung (Supporting)

Menurut Suharto (2005:95) bahwa *supporting* mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Data lapangan menunjukkan bahwa pendukung sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terjalannya kerjasama antara masyarakat Pulau Pasaran dengan lembaga eksternal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BAPPEDA Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan serta LSM yang telah mendukung untuk mengembangkan klaster ikan. Dengan demikian bahwa bahwa unsur dalam pendukung (*supporting*) telah dicapai. Peran dari Bank Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan adalah sebagai fasilitator sekaligus inisiator dalam pembentuk program Pengembangan program klaster ikan, sedangkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sebagai penyedia informasi terkait masyarakat pesisir terutama masyarakat pesisir di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Peran informan disini tidak hanya menjadi manajer perubahan yang mengorganisasikan kelompoknya melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mampu mencari serta mengatur sumber dana. Upaya pendampingan merupakan upaya pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat yang mana dapat dilakukan dengan kerjasama antar pihak fasilitator dengan lembaga eksternal lainnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat pesisir di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.

Pemeliharaan (Foresting)

Berdasarkan data di lapangan ditemukan bahwa tidak ada langkah pemeliharaan yang dilakukan pihak fasilitator atas berjalannya program pengembangan wilayah klaster ikan teri kering di Pulau Pasaran ini. Peran dan fungsi pengurus ditingkat kelompok belum berjalan sebagaimana mestinya, dan beberapa kelompok masih mengandalkan peran dari ketua-ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dalam indikator pemeliharaan ini juga salah satu dari fasilitator lepas tanggung jawab dari program pengembangan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan karna menurut fasilitator, masyarakat pesisir terutama masyarakat Pulau Pasaran Di Kota Bandar Lampung sudah mampu berdiri sendiri atau sudah mampu mandiri sehingga tidak perlu lagi didampingin lagi. Oleh Karena itu, pemeliharaan disini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program yang ada, ketika fasilitator sudah sampai pada tahapan akhir dari proses pengembangan klaster, pada tahap ini pencapaiannya sangat bervariasi disesuaikan dengan kondisi klaster yang dikembangkan. Secara konsep pencapaian yang diharapkan sebagaimana pedoman buku panduan pelaksanaan klaster Bank Indonesia antara lain terbangunnya akses dan divesifikasi pasar serta terbangunnya akses bahan baku secara berkesinambungan. Namun kenyataannya ketika fasilitator sudah pada tahap akhir, program pengembangan klaster ini tidak berjalan dengan baik. Merujuk pada pendapat Suharto dalam Anwas (2014:88) yang menyatakan bahwa pemeliharaan ialah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang yang

Imron, Atika,
Sulistio:
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir Melalui
Pengembangan
Klaster ...

118

memperoleh kesempatan berusaha, dengan demikian tahap *foresting* ini pada program pemberdayaan masyarakat Pesisir pulau pasaran tidak berjalan dengan baik.

Kendala Pemberdayaan

Faktor yang menjadi kendala pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan klaster ikan adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya merubah pola pikir dan cara pandang komunitas sasaran
Komunitas pendampingan secara umum masih berpikir secara instan dimana setiap ada kegiatan program pada dasarnya harus memberikan keuntungan finansial buat mereka. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu proses penyadaran bagi kelompok sasaran.
2. Keterbatasan dana
Keterbatasan dana merupakan hal yang umum terjadi di hampir semua kegiatan, tidak terkecuali pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran ini. Seluruh proses pemberdayaan yang dilaksanakan dalam pengembangan klaster ikan ini membutuhkan banyak dana, terutama dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dari pihak fasilitator. Selain itu, masyarakat sekitar juga kurang dapat menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk menghasilkan sokongan dana, ditambah lagi pengetahuan mereka dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain masih sangat minim.
3. Tingkat Pendidikan yang Rendah
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tingkat Pulau Pasaran sangat mempengaruhi masyarakat dalam memahami pengetahuan terkait penyuluhan pengembangan klaster yang diberikan oleh fasilitator. Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat dan cara pandang masyarakat Pulau Pasaran, yang hanya berpikir untuk mencari keuntungan jangka pendek saja sehingga masyarakat enggan mengikuti kegiatan apabila tidak ada keuntungan finansial langsung.

Imron, Atika,
Sulistio:
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir Melalui
Pengembangan
Klaster ...

119

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan yang berada di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Fasilitator dapat memfasilitasi masyarakat dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Sumber personal, sumber interpersonal, sumber sosial. Fasilitator telah memfasilitasi dengan memberikan sarana dan prasarana terkait pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.
 - b) Fasilitator melalui pendampingan koperasi Mitra Karya Bahari di Pulau Pasaran, dengan melakukan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, juga melakukan penguatan kelembagaan koperasi sebagai upaya penyadaran masyarakat Pulau Pasaran agar termotivasi untuk berkelompok yang akhirnya mempunyai kesamaan visi dan misi dalam pencapaian kesejahteraan bersama melalui pembentukan unit usaha bersama. Penguatan dilakukan ketika ada fasilitator saja namun ketika fasilitator sudah keluar (*phasing out*) dari pengembangan klaster ini maka masyarakat Pulau Pasaran kembali kepada kegiatan semula.
 - c) Bank Indonesia selaku fasilitator melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA Kota Bandar Lampung dan *stakeholders* untuk mendukung pengembangan klaster ikan, diantaranya dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pembangunan beberapa fasilitas umum di Pulau Pasaran terkait pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran.
 - d) Apa yang dilakukan fasilitator dalam program ini adalah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Pulau Pasaran, dan tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan atas berjalannya program pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran ini ke depannya.

- 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaa masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung yaitu :
 - a) Sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran
 - b) Adanya keterbatasan dana.
 - c) Tingkat pendidikan yang rendah

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Fasilitator hendaknya memperluas fokus penyuluhan yang mereka berikan, tidak hanya monoton pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya untuk merubah pola pikir dan paradigma sebagian masyarakat yang partisipasinya terhadap program ini masih rendah.
2. Fasilitator perlu mengupayakan/memfasilitasi penghimpunan modal koperasi dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat secara merata dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan klaster-klaster usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat lainnya khususnya pada sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kedepannya masyarakat tidak akan terus bergantung pada fasilitator.
3. Pihak fasilitator dan masyarakat Pulau Pasaran, masing-masing pihak hendaknya memiliki kesadaran diri dan komitmen yang kuat untuk menjalankan pengembangan klaster ikan ini.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pengalokasian anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan dapat terealisasi secara merata dan menyeluruh
5. Meningkatkan pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat secara berkelanjutan
6. Meningkatkan dukungan *stakeholders* kepada Pulau Pasaran sebagai klaster ikan modern.

Imron, Atika,
Sulistio:
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir Melalui
Pengembangan
Klaster ...

120

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Lambolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Aditama.
- Wrihatnolo, Randy dan Nugroho, Riant.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- <http://beranda-miti.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/>, (diakses tanggal 9 September 2014 Pukul 20.00 WIB)
- <http://www.bi.go.id/umkm/lampung> (diakses pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 19.00 WIB)
- <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran> (diakses pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 13.00 wib)